



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIHARJO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 71350

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 695.000.000

1. Tanah Seluas 250 m2 di PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/176 m2 di PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 451 m2/9 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 234.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO NC1 1A3C Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV HHR-V RU1 1,5SCVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOP METIC PRESTICE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 97.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.436.411

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.030.786.411

III. HUTANG Rp. 28.475.227

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.002.311.184

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUDIN
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
3. NHK : 446795

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/90 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	110.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, DAIHATSU/SIGRA 1.2 RM B401RS-GMZFJ / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	313.100.000
III. HUTANG	Rp.	143.637.282
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	169.462.718

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHMAD FAKHRIZAL NUR
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 129232

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **495.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/78 m2 di KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 280 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **250.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **25.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **8.943.780**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **---**

Sub Total **Rp.** **778.943.780**

III. HUTANG **Rp.** **630.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **148.943.780**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Priyo Budi Admoko
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 198739

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.500.000

1. MOTOR, Honda ACH1M1B04 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.930.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.893.578

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 453.323.578

III. HUTANG Rp. 450.400.539

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.923.039

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.